



## PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2017/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dengan persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Isbat Nikah atas nama:

**Umar Waelo bin Hi. Abdul Rahim Waelo**, lahir di Haya, tanggal 19 Juli 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Amalatu, Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Murni Toisuta binti Dominggus Tahalele**, Lahir di Laimu, tanggal 31 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Amalatu, Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di muka persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon tanggal 03 Agustus 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register perkara Nomor 72/Pdt.P/2017/PA.Msh. tanggal 03 Agustus 2017 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Senin tanggal 21 April 1986 M, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1406 H, yang dilaksanakan di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah dengan wali nikah yaitu saudara Kandung Pemohon II yang

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2017/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah dengan wali nikah yaitu saudara Kandung Pemohon II yang bernama Ashar Tahalele dan yang menikahkan bernama Hi. Jamil Key, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hatib Tawakal Wailissa dan Hi. Abdul Rahim Waelo serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan secara syari'at Islam;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
  - 3.1. Argam Waelo, lahir di Haya, 10 Juli 1998;
  - 3.2. Jalia Waelo, lahir di Haya, 8 Juli 2001;
  - 3.3. Yunita Waelo, lahir di Haya, 28 Juni 2003;
  - 3.4. Galib Waelo, lahir di Haya, 17 Desember 2006;
  - 3.5. Marwa Waelo, lahir di Haya, 29 Oktober 2011;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena sampai sekarang tidak tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim yang

*Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2017/PA Msh*





memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**Umar Waelo bin Hi. Abdul Rahim Waelo**) dengan Pemohon II (**Murni Touisuta binti Dominggus Tahalele**) yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 April 1986 M, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1406 H, yang dilaksanakan di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

**Subsider :**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hasan Nanuayo bin Ibrahim Nanuayo, lahir di Haya, 3 Juni 1967, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Amalatu, Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Umar Waelo dan Murni;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, dan telah menikah sesuai dengan syari'at Islam;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Negeri Haya, pada tanggal 21 April 1986;

*Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2017/PA Msh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ashar Tahalele, menyerahkan kepada PPN Bapak Hi. Jamil Key untuk menikahkan para Pemohon;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Hatib Tawakal Wailissa dan Hi. Abdul Rahim Waelo serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa para Pemohon telah mempunyai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Argam Waelo, Jalia Waelo, Yunita Waelo, Galib Waelo dan Marwa Waelo;
  - Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus gadis (perawan) dan bujang (jejaka);
  - Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
  - Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan tujuan mendapatkan buku nikah untuk memenuhi kelengkapan persyaratan membuat akta kelahiran anak-anak para Pemohon ;
2. Tawakal Wailissa bin Abd Basir Wailissa, lahir di Haya, 4 April 1969, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Amalatu, Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Umar Waelo dan Murni;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, dan telah menikah sesuai dengan syari'at Islam;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Negeri Haya, pada tanggal 21 April 1986;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2017/PA Msh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon I yang bernama Bapak Ashar Tahalele, menyerahkan kepada PPN Bapak Hi. Jamil Key untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Hatib Tawakal Wailissa dan Hi. Abdul Rahim Waelo serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon telah mempunyai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Argam Waelo, Jalia Waelo, Yunita Waelo, Galib Waelo dan Marwa Waelo;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus gadis (perawan) dan bujang (jejaka);
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan tujuan mendapatkan buku nikah untuk memenuhi kelengkapan persyaratan membuat akta kelahiran anak-anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya sebagai kesimpulan para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang istbat nikah tersebut, oleh Pengadilan telah

*Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2017/PA Msh*



diumumkan pada tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017, pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengisbatkan perkawinannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2017/PA Msh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Hasan Nanuayo bin Ibrahim Nanuayo dan Bapak Tawakal Wailissa bin Abd Basir Wailissa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I sebagai Jejaka dan Pemohon II Perawan, yang menjadi wali nikah adalah saudra kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ashar Tahalele dan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing Bapak Hatib Tawakal Wailissa dan Hi. Abdul Rahim Waelo, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Hi. Jamil Key, serta disebut mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, telah mempunyai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

1. Argam Waelo, lahir di Haya, 10 Juli 1998;
2. Jalia Waelo, lahir di Haya, 8 Juli 2001;
3. Yunita Waelo, lahir di Haya, 28 Juni 2003;
4. Galib Waelo, lahir di Haya, 17 Desember 2006;
5. Marwa Waelo, lahir di Haya, 29 Oktober 2011;

dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para Pemohon, oleh karena itu Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 308 dan 309 RBg

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2017/PA Msh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, 16 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 1986 di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud, Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pasal Pasal 8 ayat (2) huruf (a) tersebut menyebutkan "untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kec".

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (1) tersebut menyebutkan "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan";

Menimbang, bahwa 34 ayat (4) tersebut menyebutkan "pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan";

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2017/PA Msh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 35 huruf (a) menyebutkan "pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *exofficio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Umar Waelo bin hi. Abdul Rahim Waelo**) dengan Pemohon II (**Murni Toisuta binti Dominggus Tahalele**) yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 April 1986 M, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1406 H, yang dilaksanakan di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan biaya penetaapan ini sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah). Kepada Pihak Sponsor (Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah),-

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017. bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1438 H. oleh kami, **Abubakar Gaite, S.Ag., MH.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut telah dibacakan oleh

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2017/PA Msh



Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dibantu oleh **Fauziah, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;



Hakim,

**Abubakar Gaite, S.Ag., MH**

Panitera Pengganti,

**Fauziah, S.HI**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp	<b>91.000,-</b>

Sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2017/PA Msh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)